

Sejauh Mana Partisipasi Perempuan Menentukan Kemakmuran Sosial-Ekonomi di Negara-Negara Muslim? Bukti dari Berbagai Kawasan

Muhammad Akbar Ramadhani¹, Basrian², Muhammad Noor Ashry³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: mhammadakbar75@gmail.com¹, basrian@uin-anatasari.ac.id²,
muhammadnoor.mn838@gmail.com³

Article History:

Received: 13 Maret 2026

Revised: 15 Mei 2026

Accepted: 30 Mei 2026

Keywords:

Woman Empowerment, Woman Participation, Socio-Economic Prosperity, HDI, Muslim Countries

Abstract: *This study investigates the extent to which women's participation determines socioeconomic welfare, measured by the Human Development Index (HDI), in Muslim-majority countries, with particular attention to interregional heterogeneity. Utilizing panel data from 46 member states of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) over the period 2000–2022, this research applies a fixed effects model with Driscoll–Kraay standard errors. Unlike prior studies that treat the Muslim world as a homogeneous entity, this study disaggregates the sample into four regions: the Middle East and North Africa (MENA), Sub-Saharan Africa (SSA), Southeast Asia (SEA), and South Asia (SA). The sub-sample analyses reveal notable variations: the effect is weakly positive in MENA, attributable to rentier patriarchy; significantly negative in SSA, where subsistence economies force women into informal sector employment without social protection; and significantly positive in both SEA and SA. These findings underscore the necessity of accounting for regional heterogeneity, which in turn shapes the gender regime across different regions of Islamic presence. Consequently, the progressivity of women's roles and the observed outcomes of their participation are contingent upon a constellation of complex factors, including religious normative values, social norms, and economic structures.*

PENDAHULUAN

Keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan publik, termasuk politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial secara global telah mencapai perkembangan yang signifikan dalam konteks sosial masyarakat saat ini. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai peran krusial mereka dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek pekerjaan dan juga organisasi organisasi masyarakat. (Mlambo, 2026; Natacha Molina, 2019; Ryan and Woods, 2016). Perkembangan

tersebut tidak terlepas dari gelombang reformasi yang terus disuarakan dan diupayakan sehingga pada akhirnya menggeser norma-norma sosial tradisional yang membatasi. Era pasca Perang Dunia II menyaksikan perubahan kebijakan yang signifikan, termasuk undang-undang anti-diskriminasi yang memfasilitasi masuknya perempuan ke pendidikan tinggi dan peran profesional (Falconi *et al.*, 2020). Dekade 1960-an dan 1970-an kemudian menandai periode penting dengan munculnya gerakan perempuan yang menantang peran gender tradisional dan mempromosikan kesetaraan upah dan pekerjaan (Colley, 2013). Di samping itu, pendidikan bagi perempuan dan tingginya kebutuhan tenaga kerja dari beragam sektor industri yang terus berkembang menjadi magnet utama yang menarik keterlibatan mereka (Iregui-Bohórquez *et al.*, 2024; Probert, 2012).

Perkembangan dinamika sosial ini menghadirkan implikasi analitis yang tegas dan kontributif, di mana partisipasi perempuan selanjutnya perlu dipertimbangkan sebagai salah satu faktor penentu penting dari derajat kesejahteraan ekonomi dan sosial yang dicapai. Dalam literatur pembangunan, kesejahteraan tersebut secara umum dapat direpresentasikan melalui Human Development Index (HDI), yakni sebuah indeks komposit yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk mengukur capaian suatu wilayah dalam tiga dimensi fundamental: usia panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak (UNDP, 2020). Ketiga dimensi ini saling terkait dan sensitif terhadap bagaimana sumber daya dialokasikan serta bagaimana keputusan dibuat di tingkat rumah tangga, komunitas, dan negara.

Pada praktiknya, keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja dapat dimaknai sebagai upaya optimalisasi penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara. Sebagaimana dalam pandangan Solow (1956), tenaga kerja merupakan input penting yang menentukan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. Bukti empiris dari keberadaan hubungan ini telah dikonfirmasi dalam studi di kawasan Asia Tengah dan Sub Sahara Afrika, di mana peningkatan keterlibatan perempuan berasosiasi positif dengan produktifitas nasional (Kuldasheva and Ahmad, 2025; Urama *et al.*, 2022). Secara umum, partisipasi perempuan dalam urusan ekonomi dan politik merupakan prasyarat kesetaraan gender yang menciptakan dinamika sosial yang inklusif di mana kesejahteraan masyarakat yang merata secara keseluruhan justru dapat lebih efektif dicapai (Kartal and Depren, 2019; Mlambo, 2026). Manfaat ini setidaknya dapat ditelusuri dari beberapa saluran: peningkatan pendapatan perempuan yang mendorong akses pada layanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar (Dutta, 2019), partisipasi perempuan dalam politik yang berkontribusi pada pengambilan kebijakan yang lebih inklusif bagi kesetaraan gender (Reeves *et al.*, 2022), hingga signifikansi pengaruh pendidikan yang mendorong mobilitas sosial melalui penundaan pernikahan, penurunan tingkat kelahiran, dan profesionalisme yang didukung kapabilitas (Voigt and Spies, 2020).

Negara-negara muslim yang tergabung dalam organisasi Kerjasama Islam (OIC) merupakan arena analisis yang menarik untuk mempelajari isu-isu yang telah disinggung di atas. Dengan populasi yang mencakup hampir seperempat penduduk dunia dan sumber daya ekonomi yang besar, dinamika gender di negara-negara OIC memiliki implikasi global yang signifikan. Kami mengidentifikasi masalah ganda yang perlu disorot dalam isu terkait. Pertama, laporan publikasi SESRIC (2025) menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja perempuan OIC (41,2%) yang jauh lebih rendah dibandingkan negara berkembang non-OIC (50,4%) dan negara maju (55,2%). Kedua, derajat kesejahteraan sosio-ekonomi yang relatif rendah. Capaian HDI negara-negara OIC secara rata-rata menempati urutan terbawah (0.657) dibandingkan dengan negara berkembang non-OIC (0.705), negara-negara maju (0.925), dan rata-rata dunia (0.732) (SESRIC, 2023). Dalam hal ini, keduanya dapat dipandang sebagai dua fenomena berbeda yang saling terkait, bahwa signifikansi peran perempuan yang rendah menghasilkan capaian derajat kesejahteraan yang kurang optimal.

Tingkat partisipasi yang rendah dan pertumbuhan partisipasinya yang lambat mencerminkan adanya hambatan spesifik yang membatasi akses dan keterlibatan perempuan, meskipun komitmen institusional telah ditunjukkan melalui berbagai inisiatif seperti OIC Plan of Action for the Advancement of Women (OPAAW) yang berisi tujuan-tujuan strategis untuk meningkatkan signifikansi peran perempuan.

Keterlibatan nilai-nilai normatif dari ajaran agama yang dipegang terkadang dikaitkan sebagai faktor utama yang membentuk norma sosial yang membatasi. Hal ini dalam perkembangannya acapkali menjadi medan perdebatan dalam diskusi tentang inklusifitas agama bagi peran perempuan. Dalam konteks Islam, nilai-nilai keadilan dan hak-hak perempuan pada dasarnya didukung, namun interpretasi konservatif terhadap teks suci seringkali mengarah pada penyempitan kontribusi mereka di ruang publik (Erwani and Siregar, 2025; Hardani and Albahi, 2025). Studi Del Prado Lu (2013) dalam sampel negara-negara mayoritas muslim menunjukkan bahwa Islam berpengaruh pada pengurangan partisipasi perempuan, namun dengan koefisien determinasi yang kecil. Studi Bayanpourtehrani and Sylwester (2013) menunjukkan bahwa variabel Islam, Hindu, dan Katolik merupakan prediktor yang berpengaruh signifikan bagi penurunan partisipasi perempuan di dunia kerja. Bagaimanapun juga, dampak ini secara statistik melemah setelah mempertimbangkan sejumlah variabel kontrol perbedaan demografis, di mana variabel dummy pada kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), Asia Selatan (SA), Amerika Latin dan Karibia (LAC) kemudian diketahui sebagai prediktor yang berperan dari dampak negatif itu. Kedua temuan di atas menunjukkan bahwa agama pada praktiknya bukanlah variabel yang dominan, oleh karena itu realitas di balik partisipasi perempuan dan hambatan yang membatasinya merupakan isu yang kompleks sehingga tidak dapat disimpulkan dari keterlibatan faktor yang tunggal.

Analisis ini cukup penting mengingat sebaran agama Islam yang melampaui batas geografis, membuatnya berhadapan dan bernegosiasi dengan berbagai corak budaya, politik, norma sosial setempat, dan struktur ekonomi yang sangat berbeda (Hodgson, 1974; Lapidus, 2014). Pertemuan nilai-nilai ini juga selanjutnya membentuk gender regime yang berlaku yang pada gilirannya mungkin menampilkan kecenderungan yang berbeda di setiap tempat. Kawasan MENA sering dikaitkan dengan konservatisme gender, diskriminasi terhadap perempuan masih tertanam dalam kerangka hukum dan budaya, meskipun ada kemajuan dalam pendidikan dan kesehatan (Moghadam, 2008). Di Sub-Sahara Afrika, perempuan memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja yang tinggi, terutama di sektor pertanian. Mereka memainkan peran penting dalam produksi pangan dan keamanan pangan nasional. Namun, norma gender dan diskriminasi membatasi peluang kerja perempuan, terutama di daerah pedesaan (Ambassa and Bidiassé, 2025). Sementara itu, kawasan Asia Tenggara (SEA) seperti di Indonesia dan Malaysia menunjukkan dinamika yang lebih progresif dibandingkan MENA, dengan reformasi hukum dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan pengadilan Islam yang lebih ramah terhadap perempuan (Ahmad *et al.*, 2024; Peletz, 2022). Di Asia Selatan, sejarah panjang patriarki telah mencakup komunitas agama, termasuk Islam, Hindu, dan Buddha yang berlangsung lama. Namun transformasi sosial akibat kolonialisme dan gerakan kemerdekaan telah mempengaruhi struktur gender meskipun patriarki masih mengakar kuat (Ali, 2018).

Studi kami selanjutnya tidak akan berfokus pada faktor-faktor penentu partisipasi perempuan di kawasan negara-negara muslim, lebih dari itu kami berupaya menganalisa sejauh mana peningkatan partisipasi perempuan menimbulkan perubahan berarti pada derajat kesejahteraan sosial dan ekonomi di kawasan ini. Meskipun partisipasi perempuan dalam kelompok negara-negara OIC secara keseluruhan adalah yang terendah dari perbandingan lainnya, setidaknya

pertumbuhan ini terus terlihat meskipun lambat. Dengan demikian diskusi kami tidak berakhir pada sejauh mana gender regime menghambat partisipasi perempuan, tetapi sejauh mana ia mempengaruhi keberlangsungan dan hasil akhir dari peran perempuan yang telah terlibat yang teramati pada peningkatan HDI.

Diskusi arus utama dari studi-studi terdahulu tertuju pada ukuran pertumbuhan ekonomi sehingga meninggalkan keterbatasan pemahaman pada ukuran multidimensi seperti HDI. Beberapa studi lain telah menyumbang kontribusi penting untuk menjawab hal ini, meskipun dengan spesifikasi sampel OIC yang berbeda. Ramdayani *et al.* (2021) menerapkan sampel 15 negara-negara OIC dan mendapati temuan bahwa partisipasi tenaga kerja perempuan berpengaruh positif dalam jangka panjang pada HDI. Razmi *et al.* (2018) menggunakan sampel 16 negara-negara OIC menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di parlemen berpengaruh positif terhadap HDI. Bagaimanapun juga, masih belum diketahui jelas apakah pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap HDI benar-benar berbeda pada setiap kawasan-kawasan yang menjadi sebaran Islam. Dengan mengelompokkan sampel negara-negara muslim berdasarkan kawasan-kawasan yang berbeda (MENA), Sub-Saharan Africa (SSA), Southeast Asia (SEA), dan South Asia (SA), pendekatan ini dapat menangkap heterogenitas hasil akhir yang mungkin berbeda pada setiap kawasan karena gender regime yang berbeda.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial (HDI) di negara-negara Muslim. Secara spesifik, kami berupaya menjawab dua pertanyaan utama: Apakah pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap HDI berbeda secara signifikan antara keempat kelompok tersebut? Kedua, jika berbeda, di kelompok manakah pemberdayaan perempuan terbukti paling efektif dalam mendorong peningkatan HDI? Bagian setelah ini akan menyajikan uraian berikut. Bagian kedua adalah metode penelitian yang menjelaskan data, sampel, dan teknik estimasi. Bagian ketiga adalah hasil dan diskusi yang menguraikan temuan penelitian dan pembahasan. Bagian keempat adalah kesimpulan dan implikasi penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbasis data sekunder. Data yang relevan diperoleh melalui publikasi statistik UNDP (untuk HDI) dan World Bank (untuk indikator lainnya). Informasi spesifik mengenai variabel-variabel tersebut dilaporkan pada definisi operasional variabel di tabel 1. Sampel yang diamati merupakan 46 negara-negara anggota OIC dalam rentang waktu dari 2000-2022. Informasi dari daftar negara-negara anggota disajikan pada tabel 2. pada lampiran.

Table 1. Definisi Operasional Variabel

Variables	Abreviation	Measurement	Sources
Socio-Economic Prosperity	HDI	Human Development Index	UNDP
Woman Participation	WP	Ratio of female to male labor force participation rate (%) (modeled ILO estimate)	World Bank
Income Percapita	GDPPc	GDP, PPP (constant 2021 international \$)	World Bank
Government Expenditure	GEX	Generale Goverment Expenditure (% of GDP)	World Bank
Digitalization	ICT	Individuals using the Internet (% of population)	World Bank

Institutional Quality	IQ	6 World Governance Indicators	World Bank
-----------------------	----	-------------------------------	------------

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan, kami membangun suatu model persamaan sebagaimana ditunjukkan pada persamaan 1. HDI berdiri sebagai representasi atas kesejahteraan sosial dan ekonomi yang wujud, hal ini karena indeks tersebut menunjukkan kualitas hidup manusia dari dimensi mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan hidup layak. Partisipasi perempuan (WP) diproksi oleh persentase tenaga kerja perempuan terhadap total tenaga kerja secara keseluruhan. Estimasi yang dilakukan selanjutnya memperkirakan sejauhmana dampak yang ditimbulkan pada HDI dari setiap peningkatan partisipasi tersebut.

$$HDI_{it} = \beta_0 + \beta_1 WP_{it} + \beta_2 GEX_{it} + \beta_3 ICT_{it} + \beta_4 IQ_{it} + \beta_5 Resources_{it} + \varepsilon_{it}$$

Seperangkat variabel kontrol juga dimasukkan untuk mengisolasi efek utama dari partisipasi perempuan. Hal ini melibatkan beberapa variabel yang telah dilaporkan oleh studi-studi terdahulu yang signifikan dalam pencapaian HDI, seperti pengeluaran umum pemerintah (GEX), teknologi informasi yang diproksi dengan penetrasi internet (ICT), kualitas institusi (IQ), dan sewa sumberdaya alam (Resources) (Bala, 2024; Chen *et al.*, 2023; Kamalu and Wan Ibrahim, 2022; Miranda-Lescano *et al.*, 2023).

Strategi estimasi menggunakan pendekatan regresi data panel statis yang selanjutnya mengestimasi hubungan dari persamaan 1 melalui common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Spesifikasi model terbaik dari ketiga model tersebut selanjutnya ditentukan melalui uji chow dan uji hausman, dan uji lagrange multiplier. Probabilitas yang signifikan pada uji chow melanggengkan model fixed effect atas common effect, begitupun sebaliknya. Probabilitas dari nilai statistik yang signifikan pada uji hausman melanggengkan model fixed effect atas random effect, dan begitupun sebaliknya. Probabilitas yang signifikan pada uji lagrange multiplier melanggengkan model random effect atas common effect, dan begitupun sebaliknya (Baltagi, 2015; Widarjono, 2018).

Seperangkat uji diagnostik tambahan diterapkan untuk memastikan realibilitas hasil estimasi, oleh karena itu beberapa isu metodologis dalam data panel seperti heteroskedastisitas, autokorelasi, dan cross-sectional dependence akan diperiksa. Hal ini melibatkan uji wooldridge test (deteksi heteroskedastisitas), modified wald test (deteksi autokorelasi), dan Pesaran CD (deteksi cross-sectional dependence). Jika nilai probabilitas dari statistik ketiga uji menunjukkan nilai signifikansi pada taraf 5%, hipotesis nol gagal ditolak dan oleh karena itu ia mendeteksi isu yang dikhawatirkan. Kami selanjutnya menangani isu-isu metodologis ini (jika terjadi) dengan penyesuaian standard error menggunakan standard error drisscoll kray yang dikombinasikan dengan model spesifikasi regresi data panel terpilih. Driscoll kray memiliki standard error yang konsisten meskipun terdapat ketiga isu metodologis di atas (Hoechle, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 di dalam daftar lampiran menyajikan hasil komputasi statistik deskriptif yang meliputi nilai mean, median, minimum, maximum, standar deviasi, dan jumlah observasi. Secara komparatif, partisipasi perempuan terbesar berasal dari kawasan Sub-Sahara Afrika dengan rata rata 78 persen. Asia Tenggara menempati urutan kedua dengan rata-rata 65 persen. Asia Selatan menempati urutan ketiga dengan rata-rata sebesar 36 persen, sementara MENA menempati urutan keempat dengan rata-rata 34 persen. Bagaimanapun juga, hal ini tidak selalu berbanding lurus

dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang dicapai. Tingkat HDI tertinggi justru diraih oleh kelompok negara-negara MENA yang memiliki partisipasi perempuan terendah, sementara tingkat HDI terendah justru berlaku bagi negara-negara Sub-Sahara Afrika yang memiliki rasio partisipasi perempuan terbesar.

Sementara itu tabel 2. melaporkan hasil uji korelasi matrix untuk seluruh variabel. Seluruh pengujian yang kami kerjakan baik pada seluruh sampel maupun dalam subsampel menunjukkan ketiadaan korelasi antar residual karena nilai koefisien yang mencapai 0.80, dengan demikian isu multikolinieritas tidak terjadi.

Tabel 3. menyajikan hasil estimasi dalam sampel penuh dengan jumlah observasi sebanyak 941 dan 46 negara. Nilai probabilitas dari uji Chow dan uji Hausman signifikan pada taraf 5%, oleh karena itu fixed effect adalah model terpilih. Namun pemeriksaan kami melalui uji diagnostik menunjukkan keberadaan masalah autokorelasi, heteroskedastisitas, dan cross-sectional dependence, ini dilihat pada nilai probabilitas modified wald test, woldridge test, dan Pesaran CD yang signifikan. Untuk menangani hal tersebut, kami menerapkan estimasi fixed effect yang dikombinasikan dengan standar error driscoll kray sebagaimana kami sajikan kembali dalam tabel 3.

Table 3. Full Sample Estimation Result

Variables	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probability
WP	0.00041*	0.00021	1.95	0.064
GEX	-0.00227	0.00123	-1.58	0.128
IQ	0.02208*	0.01082	2.04	0.054
Digitalization	0.00130***	0.00938	2.94	0.008
Resources	0.00031*	0.00017	1.84	0.081
C	0.56659***	0.01292	43.82	0.000
R Squared	0.4529			
Prob. F	0.0000			
No. of Obs	941			
No. of Countries	46			

*Note: *, **, dan *** menunjukkan signifikansi pada 10%, 5%, dan 1%*

Sumber: Estimasi Penulis

Partisipasi perempuan (WP) memiliki pengaruh positif tetapi dengan koefisien dan signifikansi yang kecil terhadap HDI. Secara substantif, peningkatan satu persen partisipasi perempuan menaikkan HDI sebesar 0,04% dari rata-rata HDI sampel (0,657). Temuan ini sejalan dengan peringatan dalam literatur bahwa agregasi lintas wilayah yang sangat heterogen dapat menghasilkan estimasi yang bias ke nol karena efek positif di satu kawasan, menetralkan efek negatif di kawasan lain (Milanovic, 2015). Dengan kata lain, rata-rata global tidak mencerminkan realitas di wilayah mana pun, sehingga perlu untuk memperlakukan negara Muslim sebagai kesatuan yang heterogen. Kualitas institusi, penetrasi internet, dan sewa sumber daya berasosiasi positif pada HDI, artinya faktor-faktor lain di samping partisipasi perempuan turut memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial. Penetrasi internet adalah yang paling signifikan, hal ini menunjukkan peran krusialnya yang kontributif pada berbagai aspek kehidupan.

Analisis subsampel disajikan pada tabel 4, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, pendekatan ini merupakan strategi yang dilakukan untuk menangkap heterogenitas dampak yang mungkin dapat diamati dari keterlibatan perempuan pada HDI di berbagai kawasan negara-negara

Muslim. Seluruh estimasi pada keempat model menggunakan pendekatan fixed effect yang didasarkan pada spesifikasi model melalui uji chow dan hausman. Keberadaan isu diagnostik menjadi alasan kami untuk menerapkan kembali fixed-effect yang dikombinasikan dengan standar error driscoll kray pada model sub sampel ini .

Di MENA, partisipasi perempuan berpengaruh positif tetapi hanya signifikan pada taraf 10%. Meskipun efek ini sangat kecil, keberadaan tanda positif setidaknya menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan terbukti kontributif bagi HDI di kawasan ini. Adapun dampak pengaruh yang lemah secara statistik nampaknya cukup beralasan. Literatur menunjukkan bahwa negara-negara MENA, terutama yang kaya minyak, mengoperasikan patriarki rentier (Moghadam, 2020). Pendapatan sumber daya alam yang besar memungkinkan negara membiayai kontrak sosial di mana laki-laki menjadi pencari nafkah utama, sementara perempuan didorong ke sektor publik (pendidikan, administrasi) yang produktivitasnya rendah dan tidak terhubung dengan pertumbuhan ekonomi riil. Dengan kata lain, meskipun perempuan bekerja, mereka tidak terintegrasi ke dalam sektor-sektor yang mendorong inovasi dan peningkatan standar hidup. Hasil kami memperkuat temuan Assaad *et al.* (2020) dan Moghadam (2020), bahwa hukum keluarga yang restriktif dan sistem *guardianship* membatasi mobilitas dan pilihan pekerjaan perempuan, sehingga meningkatkan partisipasi saja tidak cukup, yang diperlukan adalah reformasi institusional yang mengubah struktur insentif. Menariknya, kualitas institusi (IQ) di MENA memiliki koefisien yang relatif besar dan sangat signifikan, mengindikasikan bahwa perbaikan tata kelola dapat menjadi leverage untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan perempuan di masa depan.

Table 4. Sub-Sample Estimation Result

Variables	MENA	SSA	SEA	SA
	(1)	(2)	(3)	(4)
WP	0.00057* (0.00033)	-0.00096*** (0.00028)	0.55298*** (0.00124)	0.79291*** (0.12791)
GEX	-0.00948** (0.00448)	0.00003** (0.00001)	0.05243* (0.02869)	-0.00848 (0.01521)
ICT	0.00110*** (0.00009)	0.00252*** (0.00034)	0.00038 (0.00022)	0.00067* (0.00034)
IQ	0.04609*** (0.01083)	-0.014199* (0.00823)	0.01852 (0.00022)	0.02127 (0.01584)
Resources	-0.00008 (0.00018)	0.00114*** (0.00039)	0.00128* (0.00068)	-0.01090 (0.06156)
C	0.70509*** (0.01372)	0.48603*** (0.02039)	0.21933* (0.11216)	0.27376*** (0.06156)
Fixed-Effect	Yes	Yes	Yes	Yes
R-Squared (R ²)	0.6246	0.5546	0.7511	0.8238
F-Stat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Obs.	401	392	64	84
No. of Countries	20	19	3	4

Note: Standard error berada dalam tanda kurung(); *, **, dan *** menunjukkan signifikansi pada 10%, 5%, dan 1%.

Sumber: Estimasi Penulis

Apa yang ditunjukkan dalam kasus di MENA sangat berbeda jauh di Sub-Sahara Afrika. Partisipasi perempuan berdampak negatif signifikan pada HDI. Hal ini menunjukkan hubungan yang paradoks, di mana SSA adalah kelompok dengan rata-rata partisipasi perempuan tertinggi setelah SEA dalam sampel keseluruhan ini. Peningkatan yang terus terjadi justru cukup destruktif bagi kondisi kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa

partisipasi perempuan yang teramati didorong oleh motif *survivalist economy*, bukan oleh pilihan atau pemberdayaan sungguhan. Beberapa laporan dan bukti empiris mengkonfirmasi bahwa mayoritas perempuan bekerja di pertanian subsisten atau sektor informal dengan produktivitas ekstrem rendah, tanpa upah layak, jaminan sosial, atau akses ke teknologi (Klasen, 2019; World Bank, 2019). Dalam kondisi seperti itu, peningkatan partisipasi tidak berarti peningkatan pendapatan per kapita atau investasi pada anak. Sebaliknya, waktu yang dicurahkan untuk bekerja (seringkali berpuh jam sehari) mengurangi waktu perawatan anak, gizi keluarga, dan pendidikan yang merupakan tiga komponen utama HDI. Dengan kata lain, perempuan di SSA terjebak dalam trade-off antara produksi dan reproduksi tanpa mendapat imbalan produktif. Studi Naveed *et al.* (2023) dan Asaleye and Strydom (2023) telah memperingatkan bahwa partisipasi tanpa kualitas pekerjaan tidak otomatis memberdayakan; temuan kami memperkuat argumen ini (dalam konteks OIC), bahwa partisipasi semacam itu bahkan dapat memperburuk HDI.

Sementara itu, koefisien sumber daya alam (Resources) di SSA justru positif. Ini mengindikasikan bahwa di SSA, pendapatan dari ekstraksi minyak, gas, atau mineral (yang sebagian besar tidak melibatkan perempuan) memberikan kontribusi terhadap HDI yang lebih besar daripada partisipasi perempuan sendiri. Fenomena ini mengingatkan pada konsep *extractive patriarchy* (Bakker and Gill, 2019), di mana sumber daya alam yang kaya dikelola oleh elit laki-laki, dan keuntungannya tidak menetes ke bawah untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan atau keluarga miskin. Sebaliknya, ekstraksi skala besar seringkali mengusir perempuan dari lahan pertanian mereka, memaksa mereka menjadi buruh dengan upah lebih rendah. Akibatnya, HDI bisa naik (karena PDB per kapita meningkat dari sektor ekstraktif), tetapi pemberdayaan perempuan tidak berkontribusi pada kenaikan itu.

Di Asia Tenggara, partisipasi perempuan memiliki koefisien yang sangat besar. Kawasan ini adalah contoh klasik dari keberhasilan transformasi struktural yang mengintegrasikan perempuan ke dalam sektor modern. Industrialisasi berbasis ekspor sejak 1980-an menciptakan permintaan besar tenaga kerja perempuan dengan upah yang relatif lebih baik dan jam kerja tetap (Amornkitvikai and Pholphirul, 2024). Pendapatan yang stabil dari rumah tangga yang melibatkan perempuan pekerja manufaktur mendorong investasi pada pendidikan dan kesehatan anak, sebuah intergenerational multiplier yang memperkuat HDI dari waktu ke waktu (Klasen, 2019). Selain itu, norma sosial di Asia Tenggara relatif egaliter, sehingga tidak ada hambatan normatif yang kuat terhadap mobilitas perempuan (Gonsoulin, 2005; Sakai, 2022). Belanja pemerintah (GEX) juga signifikan positif (0,0524), menunjukkan bahwa negara di kawasan ini aktif menyediakan infrastruktur dan layanan pengasuhan anak yang mendukung partisipasi perempuan. Dengan R-squared mencapai 0,75, model kami menjelaskan sebagian besar varian HDI di SEA, mengonfirmasi bahwa gender regime di sini sangat responsif terhadap pemberdayaan.

Di Asia Selatan, partisipasi perempuan menunjukkan pengaruh positif yang besar dan signifikan secara statistik terhadap HDI, bahkan melampaui koefisien yang ditemukan di Asia Tenggara. Namun, hasil ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati mengingat jumlah negara dalam sampel terbatas serta variasi kondisi sosial-ekonomi yang cukup tinggi antar negara. Meskipun demikian, temuan ini tidak sepenuhnya mengejutkan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di kawasan ini masih termasuk yang terendah di dunia, hanya sekitar 25–32 persen, jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 54 persen (Bank Dunia, 2024)-2. Dalam situasi di mana partisipasi perempuan dimulai dari titik dasar yang sangat rendah, peningkatan kecil sekalipun nampaknya dapat menghasilkan dampak marjinal yang besar terhadap kesejahteraan rumah tangga dan kualitas hidup manusia. Hal ini diperkuat oleh bukti empiris terkini bahwa pemberdayaan perempuan di Asia Selatan, baik melalui peningkatan akses pendidikan, perluasan

kesempatan kerja, maupun penguatan posisi tawar dalam rumah tangga, telah berhasil mendorong perbaikan indikator kesehatan dan pendidikan anak (Amir-ud-Din *et al.*, 2024). Dengan kata lain, besarnya koefisien yang terukur kemungkinan mencerminkan efek kejar-tinggal dari peningkatan partisipasi perempuan di tingkat dasar yang masih rendah. Meskipun demikian, mengingat keterbatasan jumlah sampel, temuan ini mengundang verifikasi lebih lanjut dengan cakupan negara yang lebih luas.

Kontribusi orisinal yang paling signifikan adalah identifikasi efek negatif WP di SSA, sebuah temuan yang jika robust, mengubah cara kita memahami hubungan antara partisipasi perempuan dan pembangunan di negara-negara berpendapatan rendah dengan dominasi agrikultur subsisten. Ini mengingatkan kita bahwa partisipasi bukanlah tujuan akhir, tetapi kualitas partisipasi, produktivitas, dan adanya social protection floors adalah kunci. Tanpa restrukturisasi ekonomi dan investasi pada sektor yang dapat menyerap tenaga kerja perempuan secara produktif, mendorong partisipasi dapat menjadi kontra-produktif.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur hubungan antara pemberdayaan perempuan dan pembangunan manusia di negara-negara Muslim dengan menunjukkan bahwa efek partisipasi perempuan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada konfigurasi gender regime di masing-masing kawasan. Temuan dari estimasi seluruh sampel yang hanya menghasilkan pengaruh positif yang sangat kecil dan lemah secara statistik secara teoretis mengonfirmasi bahwa agregasi lintas wilayah yang heterogen dapat menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Efek positif dari satu kawasan dapat menetralkan efek negatif dari kawasan lain, sehingga rata-rata global tidak mencerminkan realitas di wilayah mana pun. Implikasi teoretisnya adalah memperlakukan seluruh negara Muslim sebagai kesatuan homogen dalam model agregat tidak hanya bermasalah secara metodologis, tetapi juga secara substantif menghilangkan variasi penting yang justru menjadi kunci pemahaman. Dengan demikian, teori tentang pemberdayaan perempuan dan pembangunan tidak dapat dibangun di atas asumsi universalitas; sebaliknya, ia harus memperhitungkan heterogenitas kontekstual yang melekat pada sebaran geografis Islam.

Kontribusi teoretis paling signifikan adalah identifikasi bahwa di kawasan Sub-Sahara Afrika, peningkatan partisipasi perempuan justru berdampak buruk terhadap kesejahteraan sosial ekonomi. Temuan ini mengoreksi asumsi linier dan positif yang selama ini mendominasi literatur arus utama. Di kawasan ini, tingginya angka partisipasi perempuan ternyata tidak mencerminkan pemberdayaan yang sesungguhnya, melainkan dorongan untuk bertahan hidup di tengah kemiskinan struktural. Perempuan terpaksa bekerja di pertanian subsisten dan sektor informal dengan produktivitas sangat rendah, tanpa upah layak, jaminan sosial, atau akses terhadap teknologi. Akibatnya, waktu kerja yang panjang justru mengorbankan perawatan anak, gizi keluarga, dan pendidikan, tiga pilar utama pembangunan manusia. Temuan ini memperluas kerangka gender regime dengan menunjukkan bahwa dalam ekonomi yang didominasi sektor subsisten dan informal, peningkatan partisipasi tidak hanya gagal mendorong kesejahteraan, tetapi bahkan dapat memperburuk capaian HDI. Sebaliknya, keberhasilan Asia Tenggara memperkuat teori transformasi struktural: industrialisasi berbasis ekspor yang menyerap tenaga kerja perempuan ke sektor formal mampu menciptakan efek pengganda antargenerasi melalui peningkatan investasi pada pendidikan dan kesehatan anak.

Implikasi teoretis lebih lanjut adalah penolakan terhadap penjelasan tunggal dalam studi hubungan gender dan pembangunan. Pola yang sangat berbeda antar keempat kawasan, pengaruh

positif yang lemah di MENA, pengaruh negatif yang kuat di Sub-Sahara Afrika, pengaruh positif yang tinggi di Asia Tenggara, serta pengaruh positif yang besar di Asia Selatan dengan catatan keterbatasan sampel, menunjukkan bahwa determinan efektivitas pemberdayaan perempuan bersifat multidimensi dan saling terkait. Struktur ekonomi, kualitas institusi, norma sosial, dan kebijakan negara secara bersama-sama membentuk gender regime yang unik di setiap kawasan. Dengan demikian, penelitian ini menggeser pusat perdebatan teoretis dari pertanyaan sempit tentang apakah Islam membatasi perempuan menuju pertanyaan yang lebih substantif, yaitu dalam kondisi struktural dan kelembagaan apa partisipasi perempuan benar-benar dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lanjutan perlu menguji mekanisme kausal di balik efek negatif di Sub-Sahara Afrika, misalnya dengan memperhatikan dimensi kualitas pekerjaan dan beban kerja reproduktif perempuan dalam model analisis.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, N., Zamri, Z.H. and Omarali, N.S. (2024), "Islamic Nations' Approaches to Combating Gender Discrimination against Women: An Examination of the Southeast Asia Region", *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, Vol. 16 No. 2, pp. 501–530, doi: 10.18860/j-fsh.v16i2.29965.
- Ali, F. (2018), "The dynamics of islamic ideology with regard to gender and women's education in South Asia", *Asian Studies*, Vol. 6 No. 1, pp. 33–52, doi: 10.4312/as.2018.6.1.33-52.
- Ambassa, L.-F. and Bidiassé, H. (2025), "Gender Norms and Female Labor Supply in Sub-Saharan Africa: A Dynamic Panel Quantile Regression Analysis", *Journal of the Knowledge Economy*, Vol. 16 No. 2, pp. 9512–9535, doi: 10.1007/s13132-024-02281-5.
- Amir-ud-Din, R., Naz, L. and Ali, H. (2024), "Relationship between asset ownership and women's empowerment? Evidence from DHS data from 18 developing countries", *Journal of Demographic Economics*, Cambridge University Press, Vol. 90 No. 2, pp. 154–175.
- Amornkitvikai, Y. and Pholphirul, P. (2024), "Measuring the queen bee phenomenon in technically efficient firms: implications from Southeast Asian manufacturers", *Gender, Technology and Development*, Taylor & Francis, Vol. 28 No. 2, pp. 223–244.
- Asaleye, A.J. and Strydom, K. (2023), "Promoting women's empowerment: Linkages between financial development, employment and economic growth in selected African economies", *Sage Open*, SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA, Vol. 13 No. 4, p. 21582440231202412.
- Assaad, R., Hendy, R., Lassassi, M. and Yassin, S. (2020), "Explaining the MENA paradox: Rising educational attainment, yet stagnant female labor force participation", *Demographic Research*, Vol. 43, p. 817.
- Bakker, I. and Gill, S. (2019), "Rethinking power, production, and social reproduction: Toward variegated social reproduction", *Capital & Class*, SAGE Publications Sage UK: London, England, Vol. 43 No. 4, pp. 503–523.
- Bala, P. (2024), "The Impact of Mobile Broadband and Internet Bandwidth on Human Development—A Comparative Analysis of Developing and Developed Countries", *Journal of the Knowledge Economy*, Vol. 15 No. 4, pp. 16419–16453, doi: 10.1007/s13132-023-01711-0.
- Baltagi, B.H. (2015), *Solutions Manual for Econometrics*, Third Edit., Springer, New York.
- Bayanpourtehrani, G. and Sylwester, K. (2013), "Female labour force participation and religion: A Cross-Country analysis", *Bulletin of Economic Research*, Vol. 65 No. 2, pp. 107–133, doi: 10.1111/j.1467-8586.2012.00443.x.

-
- Chen, Y., Khurshid, A., Rauf, A., Yang, H. and Calin, A.C. (2023), “Natural resource endowment and human development: Contemporary role of governance”, *Resources Policy*, Vol. 81, doi: 10.1016/j.resourpol.2023.103334.
- Colley, L. (2013), “Not Codgers in Cardigans! Female Workforce Participation and Ageing Public Services”, *Gender, Work and Organization*, Vol. 20 No. 3, pp. 327–348, doi: 10.1111/j.1468-0432.2011.00582.x.
- Dutta, B. (2019), “An analytical study on association of women empowerment components with human development in context of assam”, *International Journal of Scientific and Technology Research*, Vol. 8 No. 12, pp. 2741–2745.
- Erwani, I. and Siregar, A.S. (2025), “The Role of Women in Islamic Sacred Texts: A Critical Study of Women’s Narratives and Authority in Islamic Tradition”, *Pharos Journal of Theology*, Vol. 106 No. 1, pp. 1–14, doi: 10.46222/PHAROSJOT.106.6.
- Falconi, A.M., Weber, A.M., Cullen, M.R., Stefanick, M.L., Michael, Y.L. and Darmstadt, G.L. (2020), “Shifts in Women’s Paid Employment Participation During the World War II Era and Later Life Health”, *Journal of Adolescent Health*, Vol. 66 No. 1, pp. S42–S50, doi: 10.1016/j.jadohealth.2019.10.005.
- Gonsoulin, M. (2005), “The islamic frontier: Islam and gender equity in Southeast Asia”, *Hawwa*, Vol. 3 No. 1, pp. 9–39, doi: 10.1163/1569208053628555.
- Hardani, S. and Albahi, M. (2025), “The Role of Women in Politics in Indonesia: Critical Review of Islamic Law”, *Samarah*, Vol. 9 No. 2, pp. 1108–1129, doi: 10.22373/dqmjva57.
- Hoechle, D. (2007), “Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence”, *Stata Journal*, Vol. 7 No. 3, pp. 281–312, doi: 10.1177/1536867x0700700301.
- Iregui-Bohórquez, A.M., Melo-Becerra, L.A., Ramírez-Giraldo, M.T., Tribín-Urbe, A.M. and Zárate-Solano, H.M. (2024), “Unraveling the factors behind women’s empowerment in the labor market in Colombia”, *World Development*, Vol. 183, doi: 10.1016/j.worlddev.2024.106731.
- Kamalu, K. and Wan Ibrahim, W.H. (2022), “The Influence of Institutional Quality on Human Development: Evidence from Developing Countries”, *Jurnal Ekonomi Malaysia*, Vol. 56 No. 1, pp. 93–105, doi: 10.17576/JEM-2022-5601-07.
- Kartal, M.T. and Depren, S.K. (2019), “Presence and representation of women on board of directors: A survey-based research upon companies in Turkey”, *The Role of Women in Turkish Economy: Current Situation, Problems and Policies*, pp. 105–133.
- Klasen, S. (2019), “What Explains Uneven Female Labor Force Participation Levels and Trends in Developing Countries?”, *The World Bank Research Observer*, Vol. 34 No. 2, pp. 161–197, doi: 10.1093/wbro/lkz005.
- Kuldasheva, Z. and Ahmad, M. (2025), “Empowering economic growth through female labor force participation in central Asia: Evidence from regression and dynamic analyses”, *Asia and the Global Economy*, Vol. 5 No. 2, doi: 10.1016/j.aglobe.2025.100115.
- Milanovic, B. (2015), “Global inequality of opportunity: How much of our income is determined by where we live?”, *Review of Economics and Statistics*, The MIT Press, Vol. 97 No. 2, pp. 452–460.
- Miranda-Lescano, R., Muinelo-Gallo, L. and Roca-Sagalés, O. (2023), “Human development and decentralization: The importance of public health expenditure”, *Annals of Public and Cooperative Economics*, Vol. 94 No. 1, pp. 191–219, doi: 10.1111/apce.12373.
- Mlambo, C. (2026), “Determinants of Women’s Political Participation in Fragile African States: A

- Macro-Level Analysis”, *Social Sciences*, Vol. 15 No. 3, doi: 10.3390/socsci15030170.
- Moghadam, V.M. (2008), “Feminism, legal reform and women’s empowerment in the Middle East and North Africa”, *International Social Science Journal*, Vol. 59, pp. 9–16, doi: 10.1111/j.1468-2451.2009.00673.x.
- Moghadam, V.M. (2020), “Gender Regimes in the Middle East and North Africa: The Power of Feminist Movements”, *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, Vol. 27 No. 3, pp. 467–485, doi: 10.1093/sp/jxaa019.
- Natacha Molina, G. (2019), “Women’s struggle for equality and citizenship in Chile”, *Women’s Movements and Public Policy in Europe, Latin America, and the Caribbean: The Triangle of Empowerment*, pp. 127–142, doi: 10.4324/9781315051369-7.
- Naveed, A., Ahmad, N., Naz, A. and Zhuparova, A. (2023), “Economic development through women’s economic rights: A panel data analysis”, *International Economics and Economic Policy*, p. 1.
- Peletz, M.G. (2022), “ISLAMIC COURTS, GENDER, AND THE ‘CONSERVATIVE TURN’ IN MUSLIM SOUTHEAST ASIA”, *Routledge Handbook of Islam in Southeast Asia*, pp. 305–325, doi: 10.4324/9780429275449-21.
- Del PradoLu, S.F. (2013), “Women’s electoral participation in muslim majority and non-muslim majority countries”, *Journal of International Women’s Studies*, Vol. 14 No. 3, pp. 137–147.
- Probert, B. (2012), “Gendered workers and gendered work: Implications for women’s learning”, *Understanding Learning at Work*, pp. 98–116, doi: 10.4324/9780203020050-14.
- Ramdayani, S., Majid, M.S.A. and Suriani, S. (2021), “Does Women’s Participation in Politics Matter for Economic Development in OIC-15? An Islamic Perspective”, *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 10 No. 2, pp. 209–222.
- Razmi, M.J., Abbasian, E. and Broghani, M. (2018), “The relationship between Women’s empowerment and HDI in Islamic countries”, *Int. J. Innov. Bus*, Vol. 7.
- Reeves, A., Brown, C. and Hanefeld, J. (2022), “Female political representation and the gender health gap: a cross-national analysis of 49 European countries”, *European Journal of Public Health*, Vol. 32 No. 5, pp. 684–689, doi: 10.1093/eurpub/ckac122.
- Ryan, R. and Woods, R. (2016), “Women’s political empowerment: Lessons for subnational levels of government - Nepal, Pakistan, Rwanda, and Indonesia”, *Handbook of Research on Sub-National Governance and Development*, pp. 385–405, doi: 10.4018/978-1-5225-1645-3.ch018.
- Sakai, M. (2022), “Women and Entrepreneurship in Muslim Countries”, *Gender, Development and Social Change*, Vol. Part F2154, pp. 45–85, doi: 10.1007/978-3-031-05954-4_2.
- SESRIC. (2023), *PROSPECTS AND CHALLENGES OF OIC MEMBER COUNTRIES SWOT OUTLOOK 2023*.
- SESRIC. (2025), *OIC LABOUR MARKET REPORT*.
- Solow, R.M. (1956), “A contribution to the theory of economic growth”, *The Quarterly Journal of Economics*, MIT press, Vol. 70 No. 1, pp. 65–94.
- Urama, C.E., Ukwueze, E.R., Obodoechi, D.N., Ogbonna, O.E., Eze, A.A., Alade, O.B. and Ugwu, P.N. (2022), “Women’s Labour Force Participation: Economic Growth Nexus in Sub-Saharan African Countries”, *Journal of International Women’s Studies*, Vol. 24 No. 5.
- Voigt, K. and Spies, M. (2020), “Female Education and Social Change: Changing Perceptions of Women’s Roles in Society in the High Mountains of Northern Pakistan”, *Mountain Research and Development*, Vol. 40 No. 4, pp. R9–R16, doi: 10.1659/MRD-JOURNAL-D-20-00028.1.

-
- Widarjono, A. (2018), *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- World Bank. (2019), *New Report Urges Action to Close Africa's Gender Gaps in Business Performance*.
- Ahmad, N., Zamri, Z.H. and Omarali, N.S. (2024), "Islamic Nations' Approaches to Combating Gender Discrimination against Women: An Examination of the Southeast Asia Region", *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, Vol. 16 No. 2, pp. 501–530, doi: 10.18860/j-fsh.v16i2.29965.
- Ali, F. (2018), "The dynamics of islamic ideology with regard to gender and women's education in South Asia", *Asian Studies*, Vol. 6 No. 1, pp. 33–52, doi: 10.4312/as.2018.6.1.33-52.
- Ambassa, L.-F. and Bidiassé, H. (2025), "Gender Norms and Female Labor Supply in Sub-Saharan Africa: A Dynamic Panel Quantile Regression Analysis", *Journal of the Knowledge Economy*, Vol. 16 No. 2, pp. 9512–9535, doi: 10.1007/s13132-024-02281-5.
- Amir-ud-Din, R., Naz, L. and Ali, H. (2024), "Relationship between asset ownership and women's empowerment? Evidence from DHS data from 18 developing countries", *Journal of Demographic Economics*, Cambridge University Press, Vol. 90 No. 2, pp. 154–175.
- Amornkitvikai, Y. and Pholphirul, P. (2024), "Measuring the queen bee phenomenon in technically efficient firms: implications from Southeast Asian manufacturers", *Gender, Technology and Development*, Taylor & Francis, Vol. 28 No. 2, pp. 223–244.
- Asaleye, A.J. and Strydom, K. (2023), "Promoting women's empowerment: Linkages between financial development, employment and economic growth in selected African economies", *Sage Open*, SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA, Vol. 13 No. 4, p. 21582440231202412.
- Assaad, R., Hendy, R., Lassassi, M. and Yassin, S. (2020), "Explaining the MENA paradox: Rising educational attainment, yet stagnant female labor force participation", *Demographic Research*, Vol. 43, p. 817.
- Bakker, I. and Gill, S. (2019), "Rethinking power, production, and social reproduction: Toward variegated social reproduction", *Capital & Class*, SAGE Publications Sage UK: London, England, Vol. 43 No. 4, pp. 503–523.
- Bala, P. (2024), "The Impact of Mobile Broadband and Internet Bandwidth on Human Development—A Comparative Analysis of Developing and Developed Countries", *Journal of the Knowledge Economy*, Vol. 15 No. 4, pp. 16419–16453, doi: 10.1007/s13132-023-01711-0.
- Baltagi, B.H. (2015), *Solutions Manual for Econometrics*, Third Edit., Springer, New York.
- Bayanpourtehrani, G. and Sylwester, K. (2013), "Female labour force participation and religion: A Cross-Country analysis", *Bulletin of Economic Research*, Vol. 65 No. 2, pp. 107–133, doi: 10.1111/j.1467-8586.2012.00443.x.
- Chen, Y., Khurshid, A., Rauf, A., Yang, H. and Calin, A.C. (2023), "Natural resource endowment and human development: Contemporary role of governance", *Resources Policy*, Vol. 81, doi: 10.1016/j.resourpol.2023.103334.
- Colley, L. (2013), "Not Codgers in Cardigans! Female Workforce Participation and Ageing Public Services", *Gender, Work and Organization*, Vol. 20 No. 3, pp. 327–348, doi: 10.1111/j.1468-0432.2011.00582.x.
- Dutta, B. (2019), "An analytical study on association of women empowerment components with human development in context of assam", *International Journal of Scientific and Technology Research*, Vol. 8 No. 12, pp. 2741–2745.

-
- Erwani, I. and Siregar, A.S. (2025), “The Role of Women in Islamic Sacred Texts: A Critical Study of Women’s Narratives and Authority in Islamic Tradition”, *Pharos Journal of Theology*, Vol. 106 No. 1, pp. 1–14, doi: 10.46222/PHAROSJOT.106.6.
- Falconi, A.M., Weber, A.M., Cullen, M.R., Stefanick, M.L., Michael, Y.L. and Darmstadt, G.L. (2020), “Shifts in Women’s Paid Employment Participation During the World War II Era and Later Life Health”, *Journal of Adolescent Health*, Vol. 66 No. 1, pp. S42–S50, doi: 10.1016/j.jadohealth.2019.10.005.
- Gonsoulin, M. (2005), “The islamic frontier: Islam and gender equity in Southeast Asia”, *Hawwa*, Vol. 3 No. 1, pp. 9–39, doi: 10.1163/1569208053628555.
- Hardani, S. and Albahi, M. (2025), “The Role of Women in Politics in Indonesia: Critical Review of Islamic Law”, *Samarah*, Vol. 9 No. 2, pp. 1108–1129, doi: 10.22373/dqmjva57.
- Hoechle, D. (2007), “Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence”, *Stata Journal*, Vol. 7 No. 3, pp. 281–312, doi: 10.1177/1536867x0700700301.
- Iregui-Bohórquez, A.M., Melo-Becerra, L.A., Ramírez-Giraldo, M.T., Tribín-Urbe, A.M. and Zárate-Solano, H.M. (2024), “Unraveling the factors behind women’s empowerment in the labor market in Colombia”, *World Development*, Vol. 183, doi: 10.1016/j.worlddev.2024.106731.
- Kamalu, K. and Wan Ibrahim, W.H. (2022), “The Influence of Institutional Quality on Human Development: Evidence from Developing Countries”, *Jurnal Ekonomi Malaysia*, Vol. 56 No. 1, pp. 93–105, doi: 10.17576/JEM-2022-5601-07.
- Kartal, M.T. and Depren, S.K. (2019), “Presence and representation of women on board of directors: A survey-based research upon companies in Turkey”, *The Role of Women in Turkish Economy: Current Situation, Problems and Policies*, pp. 105–133.
- Klasen, S. (2019), “What Explains Uneven Female Labor Force Participation Levels and Trends in Developing Countries?”, *The World Bank Research Observer*, Vol. 34 No. 2, pp. 161–197, doi: 10.1093/wbro/lkz005.
- Kuldasheva, Z. and Ahmad, M. (2025), “Empowering economic growth through female labor force participation in central Asia: Evidence from regression and dynamic analyses”, *Asia and the Global Economy*, Vol. 5 No. 2, doi: 10.1016/j.aglobe.2025.100115.
- Milanovic, B. (2015), “Global inequality of opportunity: How much of our income is determined by where we live?”, *Review of Economics and Statistics*, The MIT Press, Vol. 97 No. 2, pp. 452–460.
- Miranda-Lescano, R., Muinelo-Gallo, L. and Roca-Sagalés, O. (2023), “Human development and decentralization: The importance of public health expenditure”, *Annals of Public and Cooperative Economics*, Vol. 94 No. 1, pp. 191–219, doi: 10.1111/apce.12373.
- Mlambo, C. (2026), “Determinants of Women’s Political Participation in Fragile African States: A Macro-Level Analysis”, *Social Sciences*, Vol. 15 No. 3, doi: 10.3390/socsci15030170.
- Moghadam, V.M. (2008), “Feminism, legal reform and women’s empowerment in the Middle East and North Africa”, *International Social Science Journal*, Vol. 59, pp. 9–16, doi: 10.1111/j.1468-2451.2009.00673.x.
- Moghadam, V.M. (2020), “Gender Regimes in the Middle East and North Africa: The Power of Feminist Movements”, *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, Vol. 27 No. 3, pp. 467–485, doi: 10.1093/sp/jxaa019.
- Natacha Molina, G. (2019), “Women’s struggle for equality and citizenship in Chile”, *Women’s Movements and Public Policy in Europe, Latin America, and the Caribbean: The Triangle*

- of Empowerment, pp. 127–142, doi: 10.4324/9781315051369-7.
- Naveed, A., Ahmad, N., Naz, A. and Zhuparova, A. (2023), “Economic development through women’s economic rights: A panel data analysis”, *International Economics and Economic Policy*, p. 1.
- Peletz, M.G. (2022), “ISLAMIC COURTS, GENDER, AND THE ‘CONSERVATIVE TURN’ IN MUSLIM SOUTHEAST ASIA”, *Routledge Handbook of Islam in Southeast Asia*, pp. 305–325, doi: 10.4324/9780429275449-21.
- Del PradoLu, S.F. (2013), “Women’s electoral participation in muslim majority and non-muslim majority countries”, *Journal of International Women’s Studies*, Vol. 14 No. 3, pp. 137–147.
- Probert, B. (2012), “Gendered workers and gendered work: Implications for women’s learning”, *Understanding Learning at Work*, pp. 98–116, doi: 10.4324/9780203020050-14.
- Ramdayani, S., Majid, M.S.A. and Suriani, S. (2021), “Does Women’s Participation in Politics Matter for Economic Development in OIC-15? An Islamic Perspective”, *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 10 No. 2, pp. 209–222.
- Razmi, M.J., Abbasian, E. and Broghani, M. (2018), “The relationship between Women’s empowerment and HDI in Islamic countries”, *Int. J. Innov. Bus*, Vol. 7.
- Reeves, A., Brown, C. and Hanefeld, J. (2022), “Female political representation and the gender health gap: a cross-national analysis of 49 European countries”, *European Journal of Public Health*, Vol. 32 No. 5, pp. 684–689, doi: 10.1093/eurpub/ckac122.
- Ryan, R. and Woods, R. (2016), “Women’s political empowerment: Lessons for subnational levels of government - Nepal, Pakistan, Rwanda, and Indonesia”, *Handbook of Research on Sub-National Governance and Development*, pp. 385–405, doi: 10.4018/978-1-5225-1645-3.ch018.
- Sakai, M. (2022), “Women and Entrepreneurship in Muslim Countries”, *Gender, Development and Social Change*, Vol. Part F2154, pp. 45–85, doi: 10.1007/978-3-031-05954-4_2.
- SESRIC. (2023), *PROSPECTS AND CHALLENGES OF OIC MEMBER COUNTRIES SWOT OUTLOOK 2023*.
- SESRIC. (2025), *OIC LABOUR MARKET REPORT*.
- Solow, R.M. (1956), “A contribution to the theory of economic growth”, *The Quarterly Journal of Economics*, MIT press, Vol. 70 No. 1, pp. 65–94.
- Urama, C.E., Ukwueze, E.R., Obodoechi, D.N., Ogbonna, O.E., Eze, A.A., Alade, O.B. and Ugwu, P.N. (2022), “Women’s Labour Force Participation: Economic Growth Nexus in Sub-Saharan African Countries”, *Journal of International Women’s Studies*, Vol. 24 No. 5.
- Voigt, K. and Spies, M. (2020), “Female Education and Social Change: Changing Perceptions of Women’s Roles in Society in the High Mountains of Northern Pakistan”, *Mountain Research and Development*, Vol. 40 No. 4, pp. R9–R16, doi: 10.1659/MRD-JOURNAL-D-20-00028.1.
- Widarjono, A. (2018), *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- World Bank. (2019), *New Report Urges Action to Close Africa’s Gender Gaps in Business Performance*.

APPENDIX

Table 2. Daftar Negara-Negara Sampel

No.	Country	Classification	No.	Country	Classification
1	Bahrain	Arab-Core	27	Burkina Faso	Non-Arab
2	Jordan	Arab-Core	28	Cameroon	Non-Arab
3	Kuwait	Arab-Core	29	Chad	Non-Arab
4	Oman	Arab-Core	30	Côte d'Ivoire	Non-Arab
5	Qatar	Arab-Core	31	Gabon	Non-Arab
6	Saudi Arabia	Arab-Core	32	Guinea	Non-Arab
7	United Arab Emirates	Arab-Core	33	Guinea-Bissau	Non-Arab
8	Yemen	Arab-Core	34	Indonesia	Non-Arab
9	Algeria	Arab-Periphery	35	Iran	Non-Arab
10	Comoros	Arab-Periphery	36	Kazakhstan	Non-Arab
11	Djibouti	Arab-Periphery	37	Kyrgyz Republic	Non-Arab
12	Egypt	Arab-Periphery	38	Maldives	Non-Arab
13	Iraq	Arab-Periphery	39	Mozambique	Non-Arab
14	Lebanon	Arab-Periphery	40	Niger	Non-Arab
15	Libya	Arab-Periphery	41	Nigeria	Non-Arab
16	Mauritania	Arab-Periphery	42	Pakistan	Non-Arab
17	Morocco	Arab-Periphery	43	Senegal	Non-Arab
18	Sudan	Arab-Periphery	44	Sierra Leone	Non-Arab
19	Syria	Arab-Periphery	45	Tajikistan	Non-Arab
20	Tunisia	Arab-Periphery	46	Togo	Non-Arab
21	Afghanistan	Non-Arab	47	Turkey	Non-Arab
22	Albania	Non-Arab	48	Turkmenistan	Non-Arab
23	Azerbaijan	Non-Arab	49	Uganda	Non-Arab
24	Bangladesh	Non-Arab	50	Uzbekistan	Non-Arab
25	Benin	Non-Arab	51	Malaysia	Non-Arab
26	Brunei Darussalam	Non-Arab			

Table 3. Statistik Deskriptif

Variables	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
<i>All Sample</i>					
HDI					
WP					
GEX					
ICT					
WGI					
Resources					
<i>MENA</i>					
HDI	447	0.702	0.115	0.439	0.921
WP	460	34.52	13.40	0.082	66.62
GEX	459	16.06	16.06	2.360	50.83
ICT	453	37.41	31.89	0.025	100
WGI	442	-0.529	0.691	-1.999	0.746
Resources	435	19.97	17.38	0.001	66.05
<i>SSA</i>					
HDI	427	0.466	0.086	0.266	0.732
WP	437	78.374	15.93	31.63	106.23
GEX	437	21.79	12.55	1	435
ICT	437	10.67	14.23	0.035	70.70
WGI	420	-0.780	0.321	-1.546	0.799
Resources	418	9.64	7.91	0.277	47.76
<i>SEA</i>					
HDI	69	0.757	0.071	0.6	0.842
WP	69	65.79	7.183	55.54	79.870
GEX	69	14.60	6.354	6.53	29.57
ICT	69	46.56	30.62	0.925	98.97
WGI	67	0.123	0.47	-0.943	1.302
Resources	69	13.98	9.54	2.438	37.40
<i>SA</i>					
HDI	92	0.557	0.103	0.351	0.764
WP	92	35.69	14.10	7.346	57.44
GEX	90	2.50	0.622	1.578	3.657
ICT	92	17.55	22.08	0.004	95.24
WGI	89	-0.929	0.555	-1.962	0.439
Resources	86	0.914	0.796	0.002	2.891

Table 4. Matrix Korelasi

Variables	HDI	WP	logGDPPc	logGEX	ICT	WGI
<i>All Sample</i>						
HDI	1.000					
WP	-0.284	1.000				
GEX	0.356	-0.041	1.000			
ICT	-0.011	-0.128	-0.024	1.000		
WGI	0.696	-0.097	0.222	0.040	1.000	
Resources	0.512	0.030	0.207	0.066	0.441	1.000
<i>MENA</i>						
HDI	1.000					
WP	0.737	1.000				
GEX	0.672	0.555	1.000			
ICT	0.276	-0.033	0.119	1.000		
WGI	0.358	-0.028	0.269	0.357	1.000	
Resources	0.862	0.707	0.392	0.114	0.357	1.000
<i>SSA</i>						
HDI	1.000					
WP	-0.176	1.000				
GEX	0.650	-0.211	1.000			
ICT	0.042	-0.364	-0.063	1.000		
WGI	0.030	0.060	-0.087	-0.091	1.000	
Resources	0.454	-0.089	0.273	0.287	0.021	1.000
<i>SEA</i>						
HDI	1.000					
WP	-0.191	1.000				
GEX	0.346	-0.374	1.000			
ICT	0.107	-0.071	-0.240	1.000		
WGI	0.699	-0.100	0.259	0.141	1.000	
Resources	0.439	0.117	0.130	0.277	0.452	1.000